



Kinerja Penyerapan Belanja Awal Tahun Positif

Kabupaten Kubu Raya yang Tertinggi

PONTIANAK - Kinerja APBN 2024 di Kalimantan Barat tetap kuat dan adaptif dalam mengatasi berbagai risiko. Dalam hal belanja negara misalnya, tercatat hingga Januari tercatat tumbuh positif.

"Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp2.549,59 Miliar atau sebesar 9,75 persen dari total pagu anggaran," kata Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Hery Yulianto.

Dia menyebut realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp401,12 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.148,47 miliar. Realisasi belanja APBN tertinggi adalah di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah realisasi sebesar Rp187,91 miliar atau sebesar 11,29 persen dari total belanja konsolidasi regional Kalimantan Barat.

"Secara keseluruhan realisasi pos belanja pemerintah pusat dan TKD mengalami peningkatan serapan secara year on year baik secara nominal maupun presentase.

Hai ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat" jelasnya.

Adapun dari sisi TKDD, dia memaparkan, dana yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.148,47 miliar atau 13,90 persen dari total pagu dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.377,36 miliar. Penyaluran Dana Desa tahun 2024 memiliki earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk dana desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25 persen, ketahanan pangan hewani minimal 20 persen dan/atau penurunan stunting.

Dari sisi pendapatan negara, APBN Kalimantan Barat menunjukkan kinerja baik hingga 31 Januari 2024. Pendapatan negara dalam APBN Kalimantan Barat tercapai sebesar Rp832,46 Miliar atau sebesar 6,59 persen dari target APBN 2024. "Pendapatan didominasi oleh pajak penghasilan dan pajak

pertambahan nilai masing-masing sebesar Rp390,35 miliar dan Rp331,72 miliar," ujarnya.

Sektor penerimaan mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi berkontraksi.

Sementara itu, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kalimantan Barat mengalami kenaikan signifikan secara year on year dengan realisasi tertinggi pagu akun 425211 untuk pendapatan passport, 425265 pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor, dan 425341 pendapatan pelayanan pertanahan.

Lebih jauh dia menambahkan, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 tercapai sebesar Rp288,95 miliar untuk 4.163 debitur. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp46,03 miliar untuk 512 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar

Rp42,68 miliar untuk 674 debitur.

Sedangkan jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMI), pihaknya mencatat, sampai dengan 31 Januari mencapai 1.701 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp7,49 miliar.

"Sejalan dengan penyaluran KUR, Kota Pontianak menjadi daerah penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp1,02 miliar untuk 234 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp0,96 miliar untuk 207 debitur," pungkasnya. (sti)